

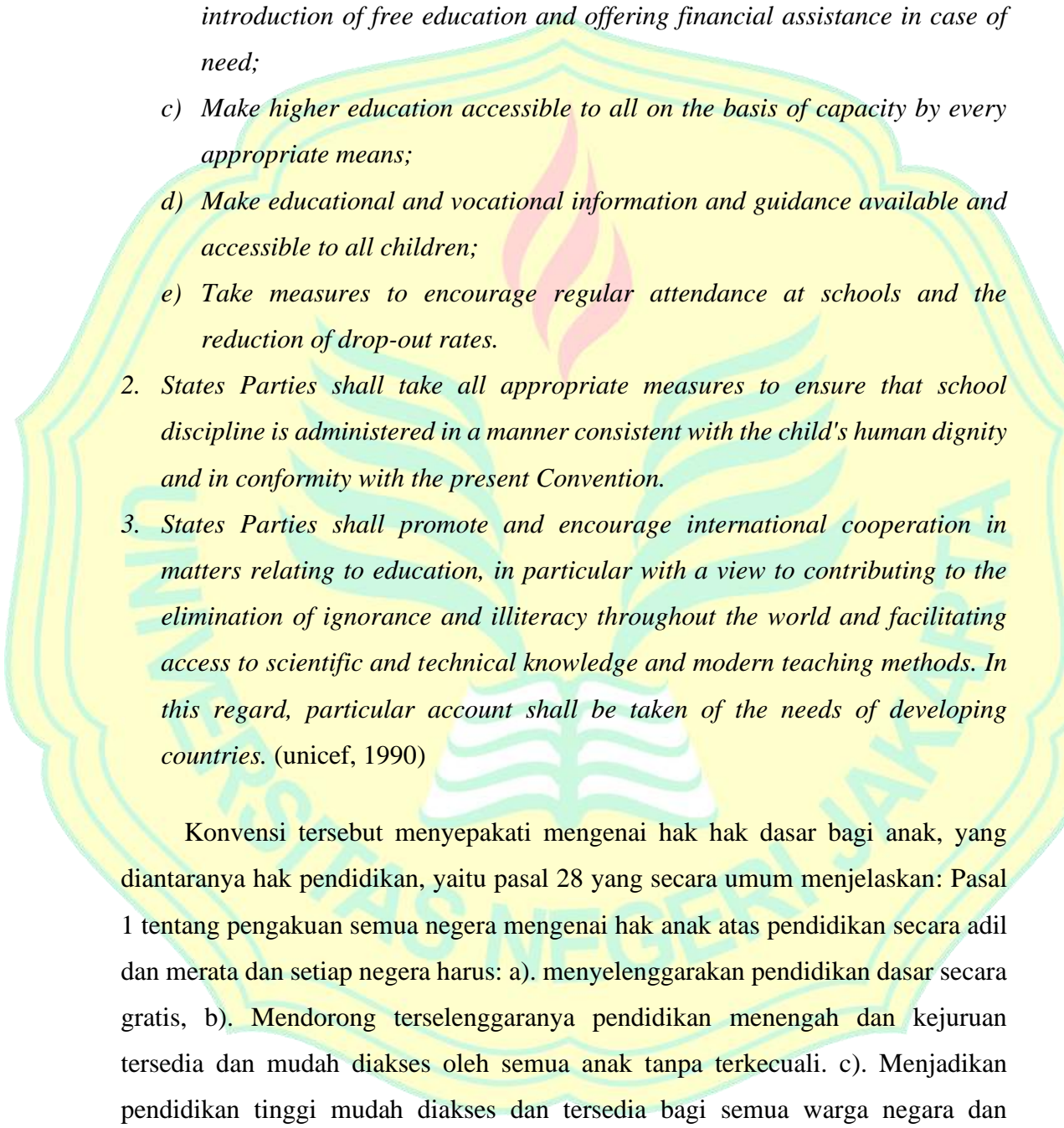
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi sebuah kesepakatan umum semua bangsa di dunia, bahwasannya pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam memajukan peradaban sebuah Bangsa. Kualitas Sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas menjadi ujung tombak kemajuan peradaban sebuah Negara. Negara-negara yang terkategori negara maju pasti memiliki system pendidikan yang berkualitas, seperti menurut riset terbaru Sophie Ireland, (2020) dalam *Ceoworld Magazine* tahun 2020, 20 Negara dengan system pendidikan terbaik dunia diantaranya: Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Australia, Jepang, Finlandia, Norwegia, bahkan Negara tetangga seperti Korea Selatan, Taiwan dan Singapura termasuk di dalamnya. Negara Negara tersebut menempatkan pendidikan sebagai faktor utama yang memegang peranan strategis dalam memajukan bangsanya, hal ini senada dengan Muhardi, (2004) dalam risetnya yang menyimpulkan bahwa “Pendidikan merupakan sumber dari segala sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan pendidikan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan”. Pendidikan yang berkualitas dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif yang akan memajukan pembangunan sebuah bangsa.

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara dan undang undang. Pendidikan telah menjadi bagian penting dari kehidupan yang diamanatkan penyelenggaraannya baik secara nasional maupun internasional. Pengakuan bahwa pendidikan merupakan hak dasar dari setiap warga negara mulai dideklarasikan oleh PBB dalam “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pendidikan”, dan diperkuat lagi dengan Konvensi hak anak yang diselenggarakan tahun 1989 yang secara rinci dijelaskan dalam pasal 28 :

1. *States Parties recognize the right of the child to education, and with a view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular:*

- 
- a) *Make primary education compulsory and available free to all;*
 - b) *Encourage the development of different forms of secondary education, including general and vocational education, make them available and accessible to every child, and take appropriate measures such as the introduction of free education and offering financial assistance in case of need;*
 - c) *Make higher education accessible to all on the basis of capacity by every appropriate means;*
 - d) *Make educational and vocational information and guidance available and accessible to all children;*
 - e) *Take measures to encourage regular attendance at schools and the reduction of drop-out rates.*
2. *States Parties shall take all appropriate measures to ensure that school discipline is administered in a manner consistent with the child's human dignity and in conformity with the present Convention.*
 3. *States Parties shall promote and encourage international cooperation in matters relating to education, in particular with a view to contributing to the elimination of ignorance and illiteracy throughout the world and facilitating access to scientific and technical knowledge and modern teaching methods. In this regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries.* (unicef, 1990)

Konvensi tersebut menyepakati mengenai hak hak dasar bagi anak, yang diantaranya hak pendidikan, yaitu pasal 28 yang secara umum menjelaskan: Pasal 1 tentang pengakuan semua negara mengenai hak anak atas pendidikan secara adil dan merata dan setiap negara harus: a). menyelenggarakan pendidikan dasar secara gratis, b). Mendorong terselenggaranya pendidikan menengah dan kejuruan tersedia dan mudah diakses oleh semua anak tanpa terkecuali. c). Menjadikan pendidikan tinggi mudah diakses dan tersedia bagi semua warga negara dan seterusnya. Pasal 2. Setiap negara harus menjamin bahwa disiplin yang ditegakan oleh sekolah harus sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan rasa kemanusiaan yang adil untuk semua kalangan berdasarkan kondisi masyarakat.

Pasal 3. Setiap negara harus menjalin kerjasama antar negara dalam memajukan pendidikan dan memecahkan masalah-masalah pendidikan di dunia.

Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mengupayakan pembangunan pendidikan di Indonesia berpegang teguh pada salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) alenia ke empat yang berbunyi: “ *kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya sampai akhir*”. Sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 di atas, Dalam batang tubuh konstitusi tahun 1945 juga dinyatakan bahwa:

Pasal 28 C ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

Ayat 1 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Ayat 2 :“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya”.

Pasal 31 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi:

“Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”

Pasal 32:

Ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Secara umum pemerintahan Negara Republik Indonesia terus mengupayakan peningkatan pembangunan pendidikan di Indonesia baik secara formal, informal

maupun non formal yang dilakukan diberbagai jenjang, mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Semua jenjang ini diharapkan memenuhi fungsi dan mencapai tujuan pendidikan nasional, seperti yang tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2003):

“Bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Berdasarkan renstra kemdikbud tahun 2020-2024 permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh Indonesia antara lain adalah:

“Permasalahan kualitas pembelajaran yang berkaitan dengan jumlah, kualitas dan penyebaran guru; Permasalahan infrastruktur sekolah yang kurang memadai dimana berdasarkan data lebih dari 50% ruang kelas di Indonesia rusak; Permasalahan sarana dan prasarana pendidikan; Permasalahan tata kelola sekolah, ada indikasi bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan guru dan bantuan sekolah tidak menunjukkan korelasi yang berarti dengan peningkatan kualitas pembelajaran; Permasalahan pemerataan akses dan kesempatan sekolah” (Kemdikbud, 2020)

Agustang et al., (2021) dalam risetnya menyatakan hal yang hampir serupa dengan kajian kemdikbud mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia meliputi: (1) Rendahnya sarana fisik baik jumlah kualitas dan penyebarannya, (2). Rendahnya jumlah, pemerataan dan kualitas guru disemua jenjang (3). Rendahnya kesejahteraan guru, (4). Rendahnya prestasi siswa baik ditingkat nasional maupun internasional, (5). Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, (6). Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, (7). Mahalnya biaya Pendidikan (Agustang et al., 2021). Zulkarnaen & Handoyo, (2019) mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia dalam seminarnya lebih menitik beratkan dalam permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia yang disebabkan oleh kualitas dan kuantitas guru yang masih belum memadai dan jumlah sekolah yang masih terbatas dan hanya terdapat dipusat pusat kota.

Dari beberapa permasalahan pendidikan yang ada, permasalahan pemerataan pendidikan dan kesempatan sekolah bagi masyarakat usia sekolah di Indonesia

masih membutuhkan perhatian lebih. Data statistic pendidikan menyatakan bahwa angka putus sekolah untuk jenjang SD sampai SMA dan SMK masih cukup tinggi, hal ini bisa dilihat pada grafik dibawah ini.



Diagram 1.1 Tren Angka Putus Sekolah di Indonesia Tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dari diagram tersebut terlihat walaupun mengalami penurunan, namun angka putus sekolah bagi anak usia sekolah masih tinggi, terutama pada tahun 2019 hampir disemua jenjang pendidikan mengalami kenaikan angka putus sekolah yang sangat signifikan yang disebabkan oleh wabah penyakit Covid 19.

Indonesia yang terdiri dari 34 Provinsi dengan luas daratan yang begitu besar yaitu sekitar 1.91 juta kilometer persegi dan jumlah pulau yang sangat banyak yaitu 17.508 pulau (BPS Indonesia, 2020), memiliki permasalahan dalam akses dan pemerataan pembangunan, hal ini berimbas pada pemerataan layanan pendidikan yang terkendala untuk daerah daerah yang sangat jauh dari pusat pemerintahan. Disamping masalah akses transportasi dan pembangunan, kondisi masyarakat Indonesia baik dari sisi ekonomi, sosial dan budaya pun masih banyak kendala, masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah akan memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya dan cenderung bekerja mencari penghidupan daripada

menyekolahkan, begitupun dari sisi sosial kebudayaan masih banyak anggapan bahwa sekolah tidak penting sehingga lebih memilih anaknya untuk bekerja atau kalau perempuan untuk menikahkannya diusia muda, atau mengaji dan lain lain. (Aliva, 2023)

Secara Nasional, salah satu upaya pemerintah untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentasi penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM) (Fatah et al., 2021). APS adalah angka yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan dalam usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, kegunaannya adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi pendidikan atau jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan pada usia sekolah tertentu, APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang aktif sekolah di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan, Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Berikut adalah, data perkembangan APK dan APM Indonesia secara Nasional mulai tahun 2015 sampai 2021.



Diagram 1.2 Perkembangan APK Indonesia Secara Nasional Tahun 2015-2021

Sumber: Kemendikbud.go.id



Diagram 1.3 Perkembangan APM Indonesia Secara Nasional tahun 2015-2021

Sumber: Kemendikbud.go.id

Keterangan Kelompok Umur :

- 1). PAUD : 3-6 Tahun
- 2). SD/MI Sederajat : 7-12 Tahun
- 3). SMP/MTS Sederajat : 13-15 Tahun
- 4). SM Sederajat : 16-18 Tahun

Dari data tersebut terlihat bahwa salah satu permasalahan pokok pendidikan di Indonesia adalah peningkatan akses pendidikan atau partisipasi belajar di kalangan penduduk usia belajar terutama di jenjang sekolah menengah (SM) dengan nilai APK terakhir tahun 2021 adalah 97,52 dan dengan APM 68,9. Nilai APK dan APM terus mengalami peningkatan seiring kerja keras pemerintah dan seluruh Masyarakat untuk memecahkan permasalahan akses atau kesempatan belajar.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia selain dari sebaran wilayah yang berjauhan adalah tidak meratanya sarana pendidikan atau jumlah sekolah di jenjang dasar dan menengah, seperti terlihat pada bagan berikut:

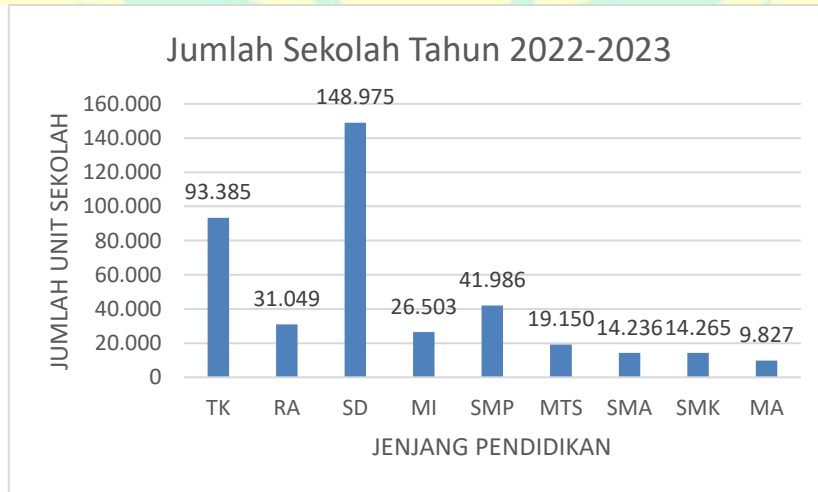


Diagram 1.4 Jumlah Sekolah Dasar dan Menengah di Indonesia Tahun 2022-2023

Sumber: Badan pusat statistik 2020

Dari diagram di atas terlihat perbedaan jumlah yang sangat signifikan antara sekolah dasar dengan sekolah menengah: antara SD dengan SMP, dan antara SMP dan SMA/SMK, terlihat gap yang sangat besar dari level SD ke SMP begitupun dari SMP ke SMA, sehingga berdampak pada angka putus sekolah di masing masing jenjang baik jenjang pasca SD menuju SMP maupun jenjang SMP menuju SMA.

Kondisi ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Aliva (2023) yang melakukan analisa terhadap penyebab meningkatnya angka putus sekolah di Indonesia pada tahun 2022, yang menyimpulkan bahwa selain faktor kondisi keluarga dan minat anak, faktor lingkungan sekolah juga berpengaruh pada meningkatnya angka putus sekolah seperti: jarak dari rumah ke sekolah, transportasi yang terbatas, jumlah ruang kelas atau sekolah yang terbatas dan terbatasnya sarana prasarana pembelajaran yang lain.

Sekolah Menengah Atas Terbuka atau SMA Terbuka diharapkan menjadi salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan pendidikan di Indonesia yang berkaitan dengan pemerataan akses dan kesempatan sekolah. Menurut Permendikbud No. 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, sekolah terbuka merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri (permendikbud no119 tahun 2014, 2014). SMA Terbuka adalah salah satu bentuk regulasi satuan pendidikan formal jenjang menengah yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari SMA induk dengan menggunakan metode belajar mandiri, terbuka dan jarak jauh (Petunjuk Teknis SMA Terbuka dan Pendidikan Jarak Jauh Provinsi Jawa Barat tahun 2017/2018). SMA Terbuka merupakan salah satu model layanan pendidikan alternatif jalur sekolah tingkat menengah dan bukan merupakan lembaga atau Unit Pelayanan Terpadu (UPT) baru yang berdiri sendiri, melainkan menginduk pada SMA reguler yang ada. (S. Siahaan & Rivalina, 2012)

SMA Terbuka mulai digagas dan dirintis oleh pusat teknologi komunikasi kemdikbud (pustekom) tahun 2001/2002 ditujuh lokasi dari enam Provinsi yang dinilai layak di Indonesia hal ini berdasarkan pertimbangan memperhatikan besarnya jumlah peserta didik yang putus sekolah di SMA dan jumlah lulusan SMP dan MTs yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Ketujuh lokasi tersebut adalah:

1. SMA Terbuka Leuwi Liang Kabupaten Bogor Jawa Barat,
2. SMA Terbuka Moga Kabupaten Pemalang Jawa Tengah,
3. SMA Terbuka Surabaya Kota Surabaya,

4. SMA Terbuka Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur
5. SMA Terbuka Rupa Kabupaten Bengkalis Riau
6. SMA Terbuka Samarinda Kota Samarinda Kalimantan Timur, dan
7. SMA Terbuka Bungaro Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. (Siahaan Sudirman, 2008)

Dalam perkembangannya sekolah menengah terbuka memberikan peluang belajar yang lebih terjangkau dan fleksibel bagi siswa siswi lulusan SMP yang terkendala secara ekonomi, waktu, sosial maupun geografis untuk bersekolah di sekolah reguler, sehingga jumlah sekolah menengah atas penyelenggara sekolah menengah terbukapun semakin lama semakin banyak.

Di Jawa Barat, SMA Terbuka mulai dibuka dan diinisiasi oleh gubernur Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan dalam rangka percepatan peningkatan angka partisipasi murni (APM) atau Angka Partisipasi Kasar (APK) Jawa Barat. APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase, kegunaannya adalah untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai, kriterianya adalah Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100%. Sedangkan APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase kegunaannya adalah Untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu kriterianya adalah makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah dijenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah yang masih menjalani sekolah. (Kemdikbud, 2017)

Pada awal peresmiannya yaitu pada tahun 2015 provinsi Jawa Barat melalui dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi mewajibkan seluruh SMA Negeri untuk menjadi sekolah penyelenggara SMA Terbuka, begitupun dengan SMA swasta, juga dianjurkan untuk menjadi penyelenggara SMA Terbuka, sehingga pada tahun 2017 jumlah sekolah penyelenggara SMA Terbuka di Jawa barat adalah 624 sekolah dari total sekolah 2953 (Disdik Jabar, 2017), dan kondisi ini terus bertambah sampai dengan sekarang, dan hasilnya APM Jawa Barat dari mulai launching SMA

Terbuka sampai sekarang mengalami kenaikan yang cukup significant dan cenderung terus naik terutama mulai tahun ajaran 2014-2015.

Dengan bertambahnya jumlah sekolah terbuka di Jawa Barat secara otomatis jumlah angka putus sekolah di Jawa Barat berkurang, sehingga akses pendidikan jenjang SMA pun semakin banyak dan mudah, hal ini sesuai dengan salah satu target dan tujuan penyelenggaraan SMA Terbuka di Jawa Barat, seperti yang disampaikan oleh Kabid SMA

Disdik Provinsi Jawa Barat, 2017-2018, Yesa Sarwedi bahwa tujuan program SMA Terbuka adalah mempercepat pencapaian APK-APM, meningkatkan akses layanan pendidikan sekolah menengah, meningkatkan mutu layanan pendidikan dan melalui pengembangan keterampilan / keahlian yang dapat menunjang langsung, kehidupan peserta didik setelah selesai mengikuti pendidikan (Pojoyo Bandung, 2018). Dengan meningkatnya jumlah SMA Terbuka, selain angka putus sekolah yang berkurang (APK dan APM meningkat) tingkat kesejahteraan masyarakatpun diharapkan akan meningkat, hal ini disebabkan oleh program SMA Terbuka yang lebih fleksibel, bisa diakses kapan saja, dimana saja, bisa sambil bekerja serta mengintegrasikan kurikulum *life skills* sehingga lulusannya diharapkan bisa mandiri secara ekonomi dan hidup lebih layak.

Senada dengan pernyataan di atas, pada tahun 2022 akhir, Yesa Sarwedi sebagai sekretaris dinas pendidikan provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa jumlah kuota siswa pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 di sekolah Negeri tingkat SMA dan SMK sebanyak 270.000 orang, jumlah tersebut hanya 35% dari 770.000 siswa yang terdata mengikuti PPDB tahun ini. Yesa Sarwedi menjelaskan bahwa jika dilihat dari daya tampung sekolah Negeri dengan jumlah lulusan SMP dan MTs, kecil kemungkinan semua siswa akan diterima. Yesa berharap kekurangan daya tampung tersebut dapat teratasi dengan adanya SMA dan SMK Swasta, begitupun dengan SMA Terbuka diharapkan menjadi solusi terhadap rendahnya daya tampung SMA dan SMK reguler juga menjadi solusi bagi pelajar yang terkendala kondisi geografis ekonomi dan budaya.(Anggoro,2022)

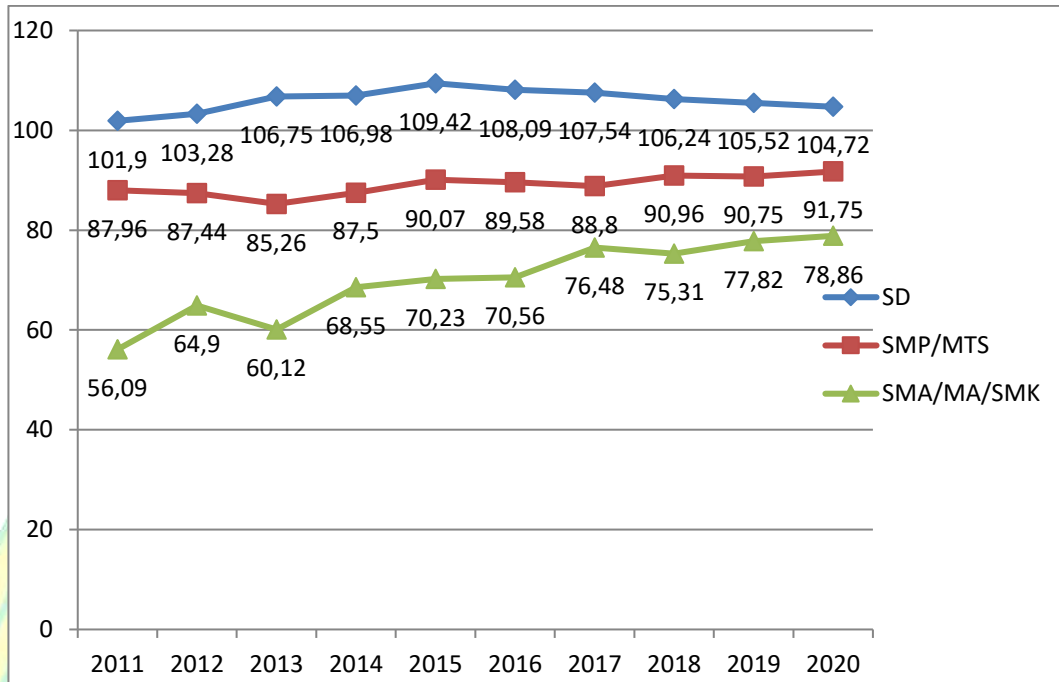


Diagram 1.5 Perkembangan APK Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

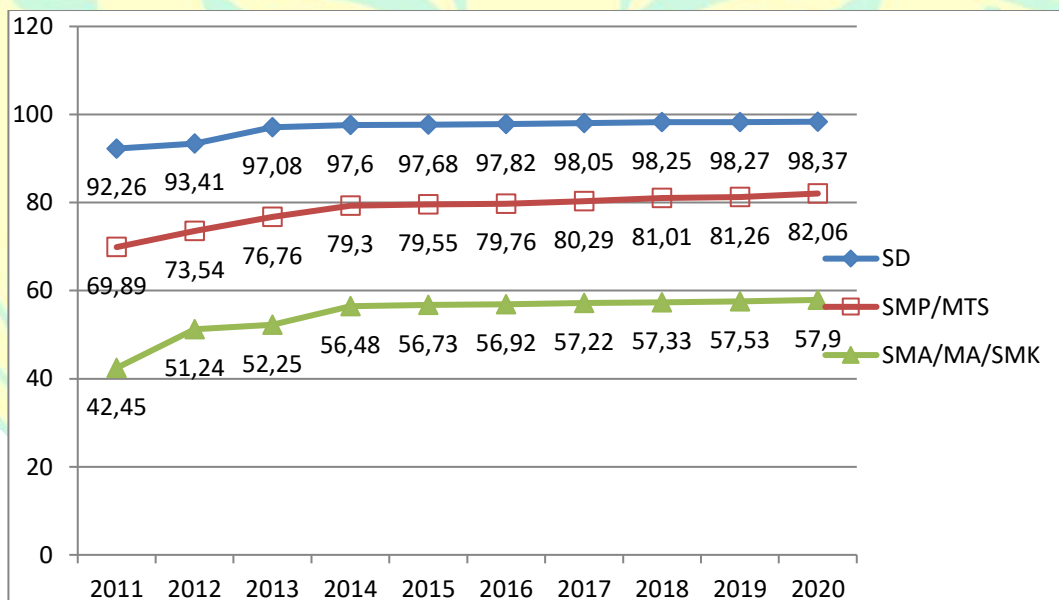


Diagram 1.6 Perkembangan APM Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dari data peningkatan APK dan APM tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan SMA Terbuka terbukti memberi kontribusi dalam meningkatkan jumlah partisipasi sekolah penduduk Indonesia khususnya di Jawa Barat. Semua

SMA di Jawa Barat, baik negeri maupun swasta dengan kriteria tertentu diwajibkan menyelenggarakan sekolah terbuka, sehingga hal ini memicu peningkatan APK dan APM Jawa Barat seperti terlihat dari grafik APK dan APM yang terus meningkat mulai tahun 2014 sampai tahun 2020.

Karakter Sekolah Terbuka dalam hal ini SMA Terbuka yang lebih fleksibel tidak terpacu ruang dan waktu dan menitik beratkan pada pembelajaran mandiri dan berbasis IT ini menjadi hal yang sangat menarik karena sesuai dengan kondisi zaman yang semakin global dimana media social berbasis IT sudah sangat dekat dan familiar dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat secara praktik dapat dengan mudah mengakses berbagai macam informasi dan ilmu pengetahuan (Buselic, 2017). Hal ini hampir sama dengan kebijakan terkini Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yaitu kebijakan “Merdeka Belajar” dengan artian bahwa sekolah, guru dan muridnya punya kebebasan untuk berkreasi berinovasi, untuk belajar dengan mandiri dan kreatif mengembangkan semua potensi peserta didik sehingga bukan hanya kuantitas, kualitas pembelajaranpun bisa tercapai (Kompas.com, 2021).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam hal berkomunikasi dan bertukar informasi, kepemilikan *hand phone* atau gawai hampir sudah merata disemua penduduk Indonesia baik orang tua maupun anak-anak atau usia sekolah. Pada tahun 2017, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis hasil survei berkaitan tentang penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia. Hasil survey menunjukkan terjadi peningkatan pengguna internet di Indonesia yaitu mencapai 143,26 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 262 juta jiwa. Artinya sebanyak 54,68% penduduk Indonesia telah terpapar dengan internet. Dari survei yang sama didapat informasi bahwa:

- 1) pengguna Gawai dan internet dikalangan usia muda atau usia sekolah lebih dominan dibandingkan dengan usia yang lebih lanjut. Data menunjukkan bahwa penetrasi internet pada kategori usia 13-18 tahun mencapai 75,50%, dan penetrasi internet pada kategori usia 19- 34 tahun mencapai 74,23%.
- 2) dilihat dari perangkat yang digunakan, tampak bahwa sebagian besar penduduk (83.44%) menggunakan gawai (smartphone dan tablet) pribadi dibanding

menggunakan komputer/ laptop dan perangkat lainnya untuk mengakses internet. Dua informasi dari hasil survei APJII (2017) tersebut memberikan gambaran betapa tingginya jumlah penggunaan gawai di kalangan generasi muda yang umumnya adalah pelajar. (puslitjakdikbud, 2019)

Perkembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang masif dikalangan usia pelajar menjadi peluang untuk meningkatkan layanan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat usia sekolah. Husaini, (2014) dalam risetnya menyimpulkan bahwa: Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan mempunyai arti penting terutama dalam upaya pemerataan kesempatan Pendidikan dan peningkatan kualitas Pendidikan.

Berdasarkan fenomena diatas, upaya pemerintah untuk memecahkan permasalahan pendidikan terutama dalam hal perluasan akses pendidikan yang salah satunya melalui layanan pendidikan terbuka dan jarak jauh menjadi lebih mudah. SMA terbuka yang memberikan layanan pembelajaran secara mandiri terbuka dan berdasarkan IT memberi peluang pada masyarakat untuk belajar kapanpun dan dimanapun tidak terkendala, terbatasnya sarana, guru dan pembatas pembatas yang lainnya. Perkembangan pembelajaran dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi menjadi lebih marak dan terbiasa sejalan dengan fenomena keamanan kesehatan secara global pandemi Covid 19, yaitu antara tahun 2019-2021. Kondisi ini mengharuskan semua orang untuk tetap di rumah dan mengurangi mobilitas dan kontak social begitupun dengan proses belajar, selama lebih dari 2 tahun, seluruh dunia menggunakan strategi pendidikan jarak jauh dan berbasis teknologi komunikasi dan informasi seperti yang selama ini dilakukan oleh sekolah terbuka. Menurut Siswanto, (2022), pandemi covid 19, telah membawa perubahan atau transformasi dalam segala bidang begitupun dibidang pendidikan. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan transformasi digital yang besar, tiba-tiba dan dramatis di masyarakat. Pandemi memaksa lompatan digital dalam teknologi Pendidikan, pemerintah dan masyarakat harus pandai mengoptimalkan transformasi ini dengan baik sehingga penguasaan IT khususnya komunikasi dan informasi bisa dioptimalkan dalam pendidikan dan pembelajaran.

Berdasarkan kondisi dan latar belakang di atas, mulai dari kesepakatan dunia akan hak pendidikan bagi semua warga negara, komitmen bangsa Indonesia dalam

usaha pemenuhan hak pendidikan seluruh warga negara yang tertuang dalam perundang undangan dan implementasi pengelolaannya oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, serta kondisi riil permasalahan pendidikan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan pemerataan dan kemudahan akses belajar atau sekolah: kurangnya jumlah dan kualitas guru, jumlah dan sebaran sekolah yang belum merata antara sekolah dasar dan menengah, tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah, transformasi digital atau penggunaan IT masyarakat yang meningkat setelah adanya pandemi Covid 19, maka penyelenggaraan SMA Terbuka menjadi sangat menarik untuk di konsentrasikan sebagai salah satu solusi permasalahan pendidikan. Kebijakan penyelenggaraan SMA Terbuka secara Nasional tertuang, tersirat dalam undang undang 1945 dan Permendikbud No. 119 Tahun 2014, tentang penyelenggara sekolah terbuka dan jarak jauh, serta kebijakan pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan APM dan APK masyarakat Jawa Barat menjadi landasan dalam penyelenggaraan SMA Terbuka secara professional dan berkualitas. Penulis tertarik untuk melihat dan menggali lebih dalam terkait penyelenggaraan SMA Terbuka di Jawa Barat yang penyelenggaraan program SMA Terbukanya berbasiskan keterampilan hidup atau *life skills*, mulai dari perencanaan sampai menghasilkan lulusan lulusan terbaiknya.

Berdasarkan observasi awal penulis di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2022 terdapat sekitar 200 sekolah penyelenggara SMA Terbuka yang tersebar di 27 kota/kabupaten. Dari sekian banyak SMA penyelenggara SMA terbuka tersebut, penulis memilih dua SMA untuk dikaji lebih dalam, karena keduanya memiliki kekhasan dalam penyelenggaraan SMA Terbuka, yaitu menyelenggarakan SMA Terbuka berbasis *life skills*. Kedua SMA Penyelenggara SMA Terbuka tersebut adalah SMAN 1 Leuwiliang, dan SMAS Puspa Mekar Citeureup Kabupaten Bogor. Di kedua SMA tersebut, peserta didik tidak hanya mendapatkan pelajaran dan pendidikan yang setara dengan peserta didik SMA reguler, namun juga diberikan pendidikan dan keterampilan *life skills* sesuai dengan kekhasan yang dimiliki sekolah tersebut.

Penyelenggaraan SMA Terbuka sebagai alternatif pendidikan dijenjang menengah dalam rangka permudahan akses belajar dan percepatan pencapaian APK

dan APM nasional diharapkan mampu membekali peserta didik dengan pendidikan dan keterampilan standar dijenjang SMA. Secara umum tidak banyak siswa SMA Terbuka melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, program pendidikan *life skills* di SMA Terbuka menjadi sebuah program yang membantu lulusan SMA untuk bekerja atau berwirausaha menciptakan lapangan kerja sendiri. Adanya pembinaan dan penguatan *life skills* bagi siswa SMA, pada dasarnya diakui bahwa tak semua lulusan SMA meneruskan sekolahnya ke PT (Perguruan Tinggi). Oleh sebab itu, mereka sebaiknya dididik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar berupa *life skills* untuk bekal hidupnya, sesuai mengikuti jenjang sekolah (Subijanto, 2007). Keterampilan atau kecakapan hidup (*life skill*) merupakan kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, dan kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi pemecahan sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan hidup dan kehidupan (UNESCO, 2013).

Fenomena di atas membawa penulis untuk menelaah lebih jauh pelaksanaan program pendidikan yang dilaksanakan di SMA Terbuka Berbasis *Life Skills*, karena disamping menjadi solusi dalam permasalahan pemerataan akses dan kualitas pendidikan juga menjadi solusi dalam permasalahan perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu dengan penerapan sekolah berbasis *life skill* atau kewirausahaan. Dalam hal ini penulis akan menelaah dengan melakukan evaluasi secara mendalam pelaksanaan program sekolah di SMA Terbuka Puspa Mekar dan SMAN 1 Leuwiliang, yang penyelenggaraannya terintegrasi dengan pendidikan *life skill* dan kewirausahaan.

B. FOKUS DAN SUB FOKUS

Secara factual diketahui bahwa masalah pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih berkisar pada permasalahan peningkatan akses dan pemerataan kesempatan sekolah serta peningkatan kualitas penyelenggaraan sekolah itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan secara layak karena terkendala berbagai permasalahan berupa sosial, ekonomi, geografi dan budaya.

Penyelenggaraan Sekolah Terbuka khususnya SMA Terbuka memberikan peluang dan menjadi solusi terhadap permasalahan pemerataan akses dan kesempatan sekolah bagi para siswa. Penyelenggaraan Sekolah Terbuka yang baik dan berkualitas akan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan pendidikan baik dari sisi kemudahan akses dan kesempatan sekolah maupun pada kualitas pendidikan itu sendiri. Karakteristik penyelenggaraan pendidikan di SMA Terbuka yang lebih luwes, fleksibel dan menekankan pada belajar mandiri memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar lebih banyak, lebih spesifik dan lebih bertanggung jawab. Serta diharapkan dengan penerapan kurikulum yang diperkaya dengan penumbuhan *live skill* mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Konsep Penyelenggaraan Sekolah Terbuka berbasis *life skills* telah menjadi solusi bukan hanya permasalahan pemerataan akses dan kualitas pendidikan juga menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi keluarga siswa juga menanamkan *life skill* dan jiwa wirausaha dikalangan siswa sehingga secara tidak langsung berusaha meningkatkan taraf hidup siswa dan keluarganya.

Berdasarkan pemikiran dan temuan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada **Evaluasi Implementasi Program SMA Terbuka Berbasis *Life Skill* di Jawa Barat** dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*context, input, process, dan product*). Adapun sub fokus yang akan dikaji dari aspek *context, input, process, dan product* adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap aspek konteks meliputi: Ruang lingkup, tujuan, manfaat program SMA Terbuka berbasis *life skill* di Jawa Barat.
2. Evaluasi terhadap aspek Input meliputi: Kemampuan awal sekolah dan siswa dalam rangka menunjang keberhasilan program SMA terbuka berbasis *life skill* di Jawa Barat.
3. Evaluasi terhadap aspek Proses meliputi: Seberapa jauh program SMA Terbuka berbasis *life skill* di Jawa Barat terlaksana sesuai dengan rencana.
4. Evaluasi terhadap aspek Produk meliputi: Capaian keberhasilan program SMA Terbuka berbasis *life skill* di Jawa Barat.

C. Pembatasan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan masalah penelitian yang disajikan di atas, maka perlu dilakukan pembatasan penelitian. Adapun pembatasan penelitian ini difokuskan pada aspek waktu, tempat dan penelitian itu sendiri. Penelitian ini merupakan deskripsi dan evaluasi secara mendalam terkait program SMA terbuka berbasis *life skill* di Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan pada rentang waktu dari tahun 2021-2023.

Berdasarkan segi tempat penelitian, penelitian ini dilakukan dengan wilayah yang difokuskan di Jawa Barat yaitu di SMA Penyelenggara SMA Terbuka berbasis *life skills*: SMA Puspa Mekar, dan SMAN 1 Leuwi Liang. Adapun dari segi konten penelitian, penelitian ini akan dibatasi pada aspek Implementasi program SMA Terbuka berbasis *life skills*, sehingga terselenggara Sekolah Menengah Terbuka yang mampu menyerap dan memberikan kesempatan sekolah bagi anak-anak usia sekolah yang berkualitas, dan menjadikan sekolah menengah terbuka sebagai alternatif penyelenggaraan sekolah yang lebih fleksibel, terbuka dan berkualitas juga mampu meningkatkan taraf hidup peserta didik baik dari sisi ekonomi sosial maupun secara budaya.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah di atas maka peneliti menyusun pertanyaan penelitian secara umum yaitu bagaimana evaluasi program SMA Terbuka berbasis *life skill* di Jawa Barat. Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut dapat dikembangkan lagi sub pertanyaan sehingga mampu menggali informasi di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi:

1. Bagaimana Program SMA Terbuka berbasis *life skills* ditinjau dari aspek konteks di Jawa Barat?
2. Bagaimana Program SMA Terbuka berbasis *life skills* ditinjau dari aspek input di Jawa Barat?
3. Bagaimana Program SMA Terbuka berbasis *life skills* ditinjau dari aspek proses di Jawa Barat?
4. Bagaimana program SMA Terbuka berbasis *life skills* ditinjau dari aspek produk di Jawa Barat?

5. Bagaimana rekomendasi dari hasil evaluasi Program SMA Terbuka berbasis *life skills* bagi perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan khususnya program SMA Terbuka berbasis *Life skills*?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu hasil Evaluasi Program SMA Terbuka berbasis *life skills* di Jawa Barat, untuk menghasilkan sebuah rekomendasi model implementasi program SMA Terbuka berbasis *life skills* yang berkualitas yang mampu memecahkan bukan hanya permasalahan pendidikan dalam hal pemerataan dan kemudahan akses sekolah namun juga dalam hal meningkatkan kemampuan ekonomi dan taraf hidup masyarakat khususnya siswa dan keluarga siswa yang bersangkutan. Evaluasi pelaksanaan Program SMA terbuka berbasis *life skills* menjadi penting di Jawa Barat karena kompleksitas masalah lingkungan dan luasnya wilayah tidak bisa diatasi sendiri baik oleh pemerintah Jawa Barat maupun oleh masing masing sekolah penyelenggara SMA Terbuka.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan model *CIPP*, tujuan umum dari penelitian ini adalah

1. Melakukan evaluasi Program SMA Terbuka berbasis *life skills* dari aspek konteks.
2. Melakukan evaluasi Program SMA Terbuka berbasis *life skills* dari aspek input.
3. Melakukan evaluasi Program SMA Terbuka berbasis *life skills* dari aspek proses.
4. Melakukan evaluasi Program SMA Terbuka berbasis *life skills* dari aspek produk.
5. Memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan program SMA Terbuka berbasis *life skills*

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: menghasilkan rekomendasi model Implementasi Program SMA Terbuka berbasis *life skills* di jenjang SMA

F. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini berupa:

1. Bagi sekolah penyelenggara Sekolah Terbuka menjadi bahan refleksi, evaluasi dan masukan dalam rangka perbaikan kualitas manajemen sekolah sehingga menghasilkan output dan outcome lulusan yang berkualitas
2. Bagi unsur pimpinan sekolah dan stake holder sekolah bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kegiatan atau program dalam rangka perbaikan kualitas SMA Terbuka.
3. Bagi pemerintah khususnya dinas pendidikan provinsi, menjadi masukan dalam rangka standarisasi mutu Sekolah Terbuka, dan dengan tersedianya model Pelaksanaan SMA Terbuka Berbasis *life Skills* yang berkualitas yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat bisa didesiminasikan ke seluruh kabupaten kota untuk menyelenggarakan SMA Terbuka Berbasis *Life skills*
4. Bagi pemerintah baik dinas pendidikan, dinas social maupun dinas tenaga kerja bisa menjadi masukan program dalam rangka meningkatkan kelayakan dan tarap hidup masyarakat baik dari sisi social, ekonomi maupun budaya.

G. Kebaruan Penelitian *State of the Art*

Untuk mengetahui tingkat kebaruan atau novelty penelitian ini, dan untuk melihat posisi penelitian dari penelitian penelitian sebelumnya terhadap unsur-unsur persamaan ataupun perbedaanya, maka diperlukan komparasi atau perbandingan dengan penelitian penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan.

Berdasarkan kajian perbandingan hasil hasil riset sebelumnya didapat kesimpulan bahwa riset tentang Sekolah Terbuka relative masih sedikit terutama yang dilakukan di Indonesia dan yang spesifik membahas tentang evaluasi program sekolah menengah terbuka, riset riset yang ada masih kajian sekitar keunggulan, plekibelitas dan peluang sekolah terbuka bagi kemajuan pendidikan di sebuah negara terutama negara berkembang, riset riset tersebut dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan. Peneliti belum menjumpai riset yang mengkaji terkait implementasi program ataupun evaluasi program Sekolah Menengah Terbuka baik dari sisi kualitas maupun kontribusinya dalam meningkatkan tarap hidup masyarakat atau peserta didik.

Diantara penelitian penelitian yang membahas mengenai Sekolah Terbuka atau SMA Terbuka disajikan dalam table berikut:

Tabel 1.1 Hasil Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Sekolah Terbuka

No	Penulis /Tahun	Judul / jurnal	Hasil Riset
1	Hsfidzin, 2017	Penyelenggaraan SMA Terbuka jarak jauh ditinjau dari model evaluasi CIPP di SMA Negeri 1 Narmanda Kecamatan Narmanda Lombok Barat / http://eprints.unram.ac.id/id/13.14	Penyelenggaraan SMA Terbuka jarak jauh di SMA Negeri 1 Narmanda, secara umum sudah berjalan efektif, namun beberapa hambatannya yang perlu mendapatkan perbaikan adalah panduan teknis program, pembagian tugas pelaksana program, dan permasalahan internet. (Hafizin, 2017)
2	Usman, 2013	Analisis Manajemen Sekolah (studi pada SMP Terbuka Ampenan Kota Mataram)./ http://repository.ut.ac.id/883/1/41417.pdf	Pelaksanaan manajemen sekolah di SMP terbuka 1 Ampenen masih terbatas, meliputi: (1) perencanaan sekolah terbatas pada : kurikulum, kesiswaan, hubungan sekolah dengan masyarakat, personalia, sarana dan prasarana, dan keuangan. (2) pengorganisasian terbatas pada komponen : kurikulum, dan personalia. (3) pelaksanaan program sekolah terbatas pada komponen kurikulum, kesiswaan, personalia, sarana prasarana dan keuangan, (4) pengawasan terbatas pada personalia dan keuangan, Juga menyimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen sekolah di smp terbuka ampenan terkendala akan kurangnya sdm, rangkap jabatan kepala sekolah, kurangnya waktu belajar di sekolah, biaya pendidikan yang sangat minim serta sarana prasarana pendidikan yang kurang memadai. (Usman, 2013)
3	Soetyono Iskandar, 2011	Manajemen SMP Terbuka dalam Rangka Wajib Belajar Sembilan Tahun (Studi Multi Situs pada tiga SMP Terbuka di Kota Malang)./ http://karyailmiah.um.ac.id/index.php/disertasi/article/view/16767/0	Semuanya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan prosedur yang dibuat, uniknya adalah adanya pemanfaatan modal yang dimiliki oleh "stakeholders," dengan pola rotasi atau bergilir dari wali murid. (Iskandar, 2011)

No	Penulis /Tahun	Judul / jurnal	Hasil Riset
4	Sudirman Siahhaan, 2004	Studi Tentang Pengelolaan Sekolah Menengah Umum Terbuka (SMU TERBUKA) / Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh, Vol. 5, No.1, Maret 2004, 59-82	Menyimpulkan bahwa Pemda Kabupaten /Kota secara umum menyambut positif pelaksanaan SMU Terbuka di wilayah mereka yang telah dilakukan oleh Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional (Pustekom-Depdiknas). SMU Terbuka dirasakan sebagai suatu sistem pembelajaran yang inovatif. SMU Terbuka diakui merupakan satu alternatif pendidikan yang bersifat fleksibel dan juga fisibel untuk diimplementasikan dan didiseminasikan secara nasional. (S. S. Siahhaan & Simanjuntak WBP, 2004)
5	Rahmi Rivalina (2011)	“Mengapa Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh (PTJJ)?”/ Jurnal Teknodik Vol. XV, Nomor 1, Juli 2011	kesimpulan riset ini adalah : sekolah terbuka dan jarak jauh dapat mengatasi berbagai macam permasalahan layanan pendidikan yang tidak bisa diberikan oleh lembaga pendidikan regular. adapun factor factor yang digunakan sebagai pertimbangan penyelenggaraan sekolah terbuka atau jarak jauh adalah (a) keterbatasan waktu, (b) kondisi geografis (c) pemukiman penduduk yang terpecah dalam jumlah yang relatif kecil (d) kondisi kemampuan finansial (financial affordance), (e) kurang beruntung secara fisik (physically disadvantaged), (f) keterbatasan sarana transportasi publik (public transportation constraint) (g) kendala dalam pengembangan karier pekerja atau pencapaian pangkat puncak bagi Pegawai Negeri Sipil (constraint in achieving the highest rank). (Rivalina, 2011)
6	Sudirman Siahhaan (2008)	Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMA TERBUKA): Sebuah Model Pendidikan Yang Fleksibel./ Jurnal Teknodik Vol. XII No. 2 Des 2008	Menyimpulkan bahwa Model/sistem pendidikan SMA Terbuka yang inovatif dan fleksibel telah memungkinkan para lulusan SMP/MTs atau yang sederajat yang “kurang beruntung dan peserta didik putus sekolah pada pendidikan Sekolah Menengah, melanjutkan pendidikannya ke SMA Terbuka. Peserta didik SMA Terbuka tidak diharuskan

No	Penulis /Tahun	Judul / jurnal	Hasil Riset
			datang setiap hari ke SMA reguler yang menjadi Sekolah Induk, tetapi cukup hanya sekali atau dua kali seminggu sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan belajar sehari-harinya dilaksanakan peserta didik secara mandiri di TKB setempat. (Siahaan Sudirman, 2008)
7	Robert Agwot Komakech (2017)	<i>Open Schooling Programme: the Answer to Education Access and Quality in Uganda</i> "/ International Journal of Innovative Research in Education, Technology & Social Strategies ISSN Hard Print: 2465-7298 ISSN Online Print: 2467-8163, May, 2017. Vol. 4, No. 2	Menyimpulkan bahwa fleksibilitas sekolah terbuka membuatnya cocok di Uganda karena secara substansial mengurangi biaya sekolah, terutama bagi pelajar kurang mampu. Pelajar dapat belajar tanpa mengabaikan tugas-tugas rumah tangga mereka atau harus mengorbankan pekerjaan mereka, yang telah menjadi alasan utama mengapa pelajar putus sekolah dan absen dari sekolah. peserta didik mendapat manfaat besar dari fleksibilitas memilih kapan, di mana dan bagaimana belajar; dan ini akan mengubah keadaan pendidikan dari baik menjadi hebat dan menjawab tantangan, kurangnya sekolah, tenaga pendidik, biaya dan sarana penunjang yang lain. (Komakech, 2017)
8	Gayane Suren Poghosyan , Anahit Movses Gasparyan, dan Diana Hamayak Grigoryan (2018)	<i>The Model of Open Agrarian School as a Means of Realization of Traditional Habits and Lifelong Learning</i>	Peneitian ini bertujuan untuk menegmbangkan system pendidikan terbuka dengan nuansa agrarian dalam meningkatkan kualitas pertanian di pedesaan, dengan kesimpulan: kompetensi profesional dan kewirausahaan di bidang pertanian siswa meningkat, begitupun dengan kretifitas dan kepemimpinanya muncul serta rasa tanggung jawab untuk memajukan pertanian dan memakmurkan desa dan nilai nilai tradisinya. (Suren Poghosyan et al., 2018)
9	M A Mannan (2010)	<i>Paradigm Shift in Learning Policies and Practices vis-a-vis Distinctive Contribution of Open and Distance Learning /COMOSA</i>	Yang menyimpulkan bahwa ODL bukan lagi model alternative layanan pendidikan dalam mengembangkan masyarakat yang berpengetahuan, tetapi menjadi system pendidikan utama di

No	Penulis /Tahun	Judul / jurnal	Hasil Riset
----	----------------	----------------	-------------

JOURNAL OF OPEN SCHOOLING/VOLUME : I NUMBER :1 JULY-DEC. 2010.

Negara Negara berkembang Asia dan Afrika. Pendidikan konvensional dibatasi oleh ruang lingkup dan cakupan pertemuan, sedangkan pembangunan ekonomi dan social di Papua Nugini, harus diimbangi dengan perkembangan masyarakat terdidik yang cepat, ODL diharapkan mampu mengimbangi pembangunan social ekonomi PNG karena memiliki keleluasaan waktu, tempat serta cakupan pendidikan yang bisa lebih banyak dan spesifik.(M A Mannan, 2010)

10 Andrew Chola (2003)

Distance Education in Papua New Guinea / Asian Journal of Distance Education
<http://www.AsianJDE.org> © 2003 The Asian Society of Open and Distance Education
 ISSN 1347-9008 Asian J D E 2003 vol 1, no 1, pp 78-82

Pendidikan jarak jauh muncul dan menyebar di PNG karena perkembangan pendidikan dan teknologi. Juga muncul karena kendala kendala social dan ekonomi. Factor factor tersebut mendorong institusi pendidikan untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih fleksibel dan dapat menjangkau masyarakat diberbagai strata social dan ekonomi. (Chola, 2003)



No	Penulis /Tahun	Judul / jurnal	Hasil Riset
11	Sukanta Sarkar, et all (2024)	<i>Open and Distance Learning Education: Benefits and Challenges in Developing Country,</i> https://www.researchgate.net/publication/380127003_Open_and_Distance_Learning_Education_Benefits_and_Challenges_in_Developing_Countries/link/662bfdcb06ea3d0b740fec59/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnNOUGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19	Hasil riset ini adalah Pendidikan terbuka jarak jauh sangat penting untuk pembangunan negara karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya untuk belajar formal. Kelebihannya adalah adanya fleksibilitas dalam semua aspek pendidikan jarak jauh mulai dari penerimaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Sistem ini cocok untuk orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan mereka tapi memiliki kendala untuk sekolah biasa. Namun tantangannya meliputi (i) Kurangnya kesadaran tentang kursus dan relevansinya; (ii) Kurangnya pengakuan yang setara dengan sekolah formal; (iii) Kurangnya interaksi dan bimbingan profesional; (iv) Terbatas atau tidak ada kontak kelas; dan (v) Penundaan tugas. Saran: Pemerintah harus membuat kebijakan dalam peningkatan kualitas dan kesetaraan sekolah jarak jauh dan terbuka

Dari penelitian penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitain penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Sekolah Terbuka, kebanyakan berkenaan tentang paparan bahwa Sekolah Terbuka sebagai solusi kemudahan akses dan pemerataan pendidikan, fleksibilitas sekolah terbuka dalam meningkatkan akses layanan pendidikan, keunggulan Sekolah Terbuka dalam memecahkan angka putus sekolah serta sekolah terbuka sebagai upaya untuk menginfiltrasi nilai dari pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu sebagai positioning diantara penelitian penelitian terdahulu, peneliti ingin menggali lebih dalam dan spesifik bagaimana Implementasi program Sekolah Terbuka khususnya di jenjang SMA, yang disamping mampu meningkatkan akses belajar, berkualitas juga mampu meingkatkan taraf hidup masyarakat (peserta didik) seperti yang tengah dilakukan oleh beberapa SMA Terbuka di Jawa Barat, dengan mengangkat tema Evaluasi Implementasi Program Sekolah Berbasis *Life Skills* Pada Sekolah Menengah Atas Terbuka di Jawa Barat.

Penelitian ini akan mengevaluasi dan mengkaji lebih dalam bagaimana SMA penyelenggara SMA Terbuka mampu mengelola pendidikan terbuka yang menjangkau masyarakat dengan kendala social, ekonomi, geografi dan budaya, secara berkualitas, disamping itu bagaimana SMA Terbuka mampu menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan tarap hidup masyarakat dengan membekali peserta didik dengan keterampilan dan nilai nilai kewirausahaan sehingga mampu mengangkat tarap hidup siswa dan keluarganya.

